

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Mardiasmo (2002) dalam Setiaji (2007) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut,

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber – sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan adanya otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan maka peranan data keuangan daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan yang berupa laporan APBD memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasinya yang mana merupakan informasi penting terutama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah serta untuk membantu membuat kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah selanjutnya (Sidharta, 2008).

Sejalan dengan perubahan UU otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaannya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang

menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Ronald, 2010).

Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan pasal 4 PP No.105

Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Oleh karena itu, kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber -sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wijaya (2012), yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009 - 2010 yang hasilnya bahwa kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah sekali karena tingkat ketergantungan pada pihak eksternal masih tinggi yang berupa DAU/DAK, Dana Penyesuaian. Sedangkan kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta masih tergolong rendah karena campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan dianggap sedikit mampu melaksanakan

otonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009 - 2011”**.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009 - 2011?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan rasio pendapatan daerah APBD tahun 2009 – 2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang indikator kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, diharapkan dapat menjadi bahan koreksi dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk tahun berikutnya.
3. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah dan menambah pengetahuan tentang keuangan daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi sumber informasi dan menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi tentang keuangan daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini uraian mengenai pengertian otonomi daerah, pengertian kinerja keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan analisis rasio keuangan daerah, penelitian terdahulu, kerangka model, dan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis rasio keuangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran – saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.